

Mahasiswa PTKIN Garis Depan Moderasi Beragama

YOGYA (KR) - Mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) diharapkan menjadi benteng keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menerapkan moderasi beragama. Mahasiswa dengan bekal intelektual harus lebih bisa menerapkan dan mentransformasikan moderasi beragama.

"Mahasiswa sebagai *agent of change* harusnya bisa menjadi inkubasi atau berada di garis depan moderasi beragama di Indonesia," tegas Presiden Mahasiswa dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Demah) UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta, Sya'idur Rahman Al Huza'ifi dalam Seminar Nasional 'Urgensi Moderasi Beragama Mencegah Paham Radikalisme di Lingkungan PTKIN', Senin (28/3) di UIN Suka secara hybrid.

Menurut Sya'idur, karakteristik Indonesia terdiri enam agama dan berbagai suku bangsa, sehingga melalui seminar



KR-Istimewa

Seminar Nasional di UIN dengan pernyataan sikap mahasiswa mendukung moderasi beragama.

ini juga dibekali pengetahuan tentang toleransi, intoleransi hingga radikalisme.

Rektor UIN Suka Prof Dr Phil Al Makin SAG MA menyatakan, untuk mewujudkan moderasi beragama harus bersama-sama, dengan membangun bersama agama lain, kelompok atau etnis lain. "Moderasi beragama jangan sampai berkumpul seagama sejenis, seorganisasi, seditaerah kemudian mengklaim moderat. Moderat itu kumpulan dari berbagai golongan, kalau sama persis dari satu agama, satu daerah,

organisasi, kelompok yang sama perlu dikaji ulang itu," jelasnya.

Sedang Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda DIJ AKBP Sinungwati mengajak para mahasiswa PTKIN untuk terus mengedepankan rasionalitas dan logika sehat dalam membendung intoleransi, radikalisme dan terorisme. "Mahasiswa tumbuh di lingkungan akademisi harusnya bisa menjadi agen perubahan di tingkat keluarga, kampung, kampus untuk bisa menyebarkan imunitas terhadap intoleransi, radikalisme dan terorisme. (Vin)

organisasi, kelompok yang sama perlu dikaji ulang itu," jelasnya.

Sedang Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda DIJ AKBP Sinungwati mengajak para mahasiswa PTKIN untuk terus mengedepankan rasionalitas dan logika sehat dalam membendung intoleransi, radikalisme dan terorisme. "Mahasiswa tumbuh di lingkungan akademisi harusnya bisa menjadi agen perubahan di tingkat keluarga, kampung, kampus untuk bisa menyebarkan imunitas terhadap intoleransi, radikalisme dan terorisme. (Vin)

PENERIMAAN MAHASISWA DI SNMPTN 2022

PTN-Prodi Favorit Lebih Bervariasi

JAKARTA (KR) - Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) Mochamad Ashari memperinci nama-nama perguruan tinggi negeri (PTN) dan program studi (prodi) yang menjadi favorit peserta didik menjadi lebih bervariasi di SNMPTN 2022. Variasi yang terjadi pada SNMPTN 2022 yang diumumkan, Selasa (29/3) menyebabkan 20 prodi dari masing-masing Saintek dan Soshum memiliki seleksi masuk yang sangat ketat.

"Luar biasa, perguruan tinggi namanya berubah semuanya dan prodi menjadi sangat bervariasi karena menyebar ke seluruh Indonesia," ujar Ashari dalam Konferensi Pers Pengumuman Hasil Seleksi SNMPTN 2022, Selasa (29/3).

Pada Saintek beberapa prodi yang paling diminati dan mengalami keketatan tertinggi antara lain Ilmu Keperawatan di Universitas Sultan Agung Tirtayasa (0,99 persen), Teknik Informatika di Universitas Padjajaran (1,09 persen), Ilmu Gizi di Universitas Sumatera Utara (1,16 persen), Farmasi di Universitas Diponegoro (1,32 persen) dan Ilmu Komputer di Universitas Negeri Jakarta (1,42 persen).

Sementara beberapa prodi terketat di Soshum antara lain Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Jakarta (0,94 persen), Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran (1,02 persen), Ilmu

Manajemen di Universitas Padjajaran (1,06 persen), Ilmu Manajemen di Universitas Negeri Jakarta (1,08 persen) dan Ilmu Manajemen di Universitas Negeri Medan (1,19 persen).

Menurut Ashari, variasi dalam pemilihan perguruan tinggi dan prodi itu disebabkan karena masyarakat sudah menyadari adanya sebuah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat baik dalam segi profesi ataupun sebuah peristiwa. Di samping itu, para peserta didik juga sudah mulai lebih memahami kemampuan diri masing-masing, sehingga perguruan tinggi atau prodi yang diminati menjadi jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Anak-anak kita semakin menyadari, ada perubahan di dalam masyarakat, perguruan tinggi juga dalam profesi. Seperti misalnya dibukanya prodi-prodi baru yang menarik seperti bisnis digital, saya rasa itu adalah

upaya perguruan tinggi yang sangat penting dan patut dihargai," ucap Ashari.

Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Prof Nizam menambahkan, hingga kini masih banyak peserta didik yang mengambil prodi tanpa memperluas wawasan terkait jurusan yang akan diambil dan berakhir tidak betah untuk melanjutkan.

Untuk mengatasi masalah yang selalu terjadi di perguruan tinggi itu, pihaknya sudah mengusung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di mana peserta didik dapat memperluas wawasan dengan mengambil mata kuliah di luar prodi utama mereka. Selain itu, prodi yang diambil juga boleh dilakukan lintas perguruan tinggi.

Hal itu bertujuan agar kemampuan para peserta didik bisa dilengkapi, memiliki kompetensi dalam dunia kerja yang menjadi lebih fleksibel dengan dinamika dunia kerja yang mereka akan hadapi. "Kami sangat berharap adik-adik membuka wawasan luas sebelum memilih prodi. Ruang itulah yang kita berikan sebagai jawaban atas anak-anak kita di dalam tanda petik salah memilih prodi untuk bisa lebih kompetitif, lebih fleksibel dengan dunia kerja yang dinamikanya sangat tinggi tadi," ujar Nizam. (Ati)

Frasa 'Madrasah' Hilang di RUU Sisdiknas

JAKARTA (KR) - Draft RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menghapus frasa 'madrasah' dan digeser di penjelasan RUU. Sejumlah pihak protes atas draf tersebut.

Demikian disampaikan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta A.Tholabi Kharlie di Jakarta, Rabu (30/3). "Sebaiknya Kemdikbud-Ristek sebagai pihak inisiator RUU Sisdiknas memerhatikan sumber materiil pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cermat dan seksama. Dalam sumber materiil hukum itu ada aspek sosiologis, filosofis, serta historis. Saya kira soal 'madrasah' ini tidak sekadar frasa tanpa makna, tapi mengandung sisi sejarah perjalanan

bangsa ini," ujarnya.

Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menegaskan, madrasah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari khazanah masyarakat muslim Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sehingga penyebutan frasa 'madrasah' dalam batang tubuh UU Sisdiknas memberi pesan soal keberpihakan negara terhadap madrasah.

"Meski penjelasan dalam sebuah UU menjadi bagian tak terpisahkan dari UU, namun ketika dibunyikan di batang tubuh UU, ada pesan keberpihakan negara terhadap madrasah," tegas Tholabi. (Ati)

Rakornas Peningkatan Layanan Pesantren

JAKARTA (KR) - Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kota Surakarta, 28-30 Maret dengan sejumlah agenda pembahasan seperti peningkatan layanan pesantren hingga dana abadi. Hal ini sekaligus upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kalangan pesantren.

Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/3) mengatakan, Rakornas ini sebagai tindak lanjut pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

dan Beasiswa Santri. Menurutnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadikan tahun 2022 sebagai momentum melakukan transformasi layanan kepada umat, termasuk masyarakat pesantren. Bahkan, Menag menjadikan Kemandirian Pesantren sebagai salah satu program prioritas.

"Bagaimana langkah strategis mewujudkan Kemandirian Pesantren, akan kita bahas bersama dalam Rakornas ini. Termasuk juga bahasan tentang dana abadi pesantren, pendidikan inklusif, pendidikan anti kekerasan dan beasiswa santri," ujarnya.

Rakornas juga mendiskusikan soal akselerasi penyiapan regulasi anti ke-

kerasan di dunia pendidikan, termasuk penguatan moderasi beragama hingga persiapan Pekan Olahraga dan Seni antar-Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) di Makassar, Oktober 2022.

Berkenaan hal itu, kata Waryono Abdul Ghafur, Rakornas menghadirkan narasumber dari Bappenas yang membahas pesantren pascapenetapan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Diundang juga narasumber dari LPDP yang akan memaparkan skema dana abadi pesantren berdasarkan Perpres 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren. (Ant)

EKONOMI

STRATEGI BISNIS DAN INVESTASI

Mengembangkan Knowledge Based Economy

KETIKA kita di sekolah dahulu, sering mendapatkan pelajaran dari guru bahwa negeri kita ini adalah negeri surga. Negeri dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, semuanya ada di Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sampai kapan kekayaan ini bisa terus ada untuk memenuhi kebutuhan warga Indonesia. Minyak dan hasil tambang yang kita eksploitasi secara terus-menerus, jumlahnya terbatas. Sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang utama, lambat laun juga terus berkurang seiring bertambahnya kepadatan penduduk. Kekayaan laut yang kita keruk terus-menerus, lambat laun juga akan habis. Maka jawaban yang mungkin bisa ditawarkan adalah kita harus mulai beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam (resource based economy) menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge based economy).

Mengutip dari World Bank, mendefinisikan knowledge based economy sebagai model pengembangan ekonomi yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia ini dicapai melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Melalui pendidikan, pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dikembangkan untuk menstimulus kreativitas, kreasi serta pengolahan informasi untuk melahirkan ide-ide atau gagasan yang dapat menjadi sumber ekonomi baru yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan knowledge based economy ini bisa dicapai selain pendidikan formal juga bisa melalui pendidikan non formal seperti pelatihan, pengembangan riset dan pengembangan teknologi berbasis informasi.

Maka ke depannya, salah satu investasi yang besar-besaran dilakukan bangsa ini semestinya adalah dalam bidang pendidikan. Mungkin kita bisa mencocokkan negara-negara yang maju sebab memfokuskan diri pada pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Beberapa negara tersebut antara lain, Jepang, Singapura dan Korea selatan.

Jepang misalnya, pasca kalah perang melawan Sekutu pada tahun 1945, mereka sadar betul bahwa negaranya sudah tidak punya apa-apa. Maka sektor utama yang mereka bangun adalah sumber daya manusia. Dan hasilnya, bisa kita lihat sekarang, Jepang menjadi salah satu negara dengan kemajuan teknologi nomor wahid di dunia.

Begitu juga dengan Singapura. Negara yang baru pisah dengan Malaysia, tidak punya apa-apa. Bahkan sebagian besar wilayahnya hanya rawa-rawa. Sadar akan hal itu, maka pemimpinnya pada waktu itu berinvestasi besar-besaran pada sektor pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Hasilnya, Singapura menjadi salah satu negara maju ekonominya di wilayah Asia Tenggara.

Contoh terakhir adalah Korea Selatan. Negara yang baru merdeka dari Jepang dan berlanjut pada perang saudara hingga tahun 1960-an ini, juga memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Hasilnya luar biasa, menjadi salah satu negara maju yang paling inovatif dengan sistem pendidikan terbaik ke empat di dunia berdasarkan World Economic Forum tahun 2021. Dengan demikian, jika negara-negara lain bisa maju dengan mengembangkan knowledge based economy, maka Indonesia juga pasti bisa. Butuh usaha dan kerja keras secara bersama, mulai dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Jika semua melakukannya secara kersama antar pihak, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menyusul menjadi negara maju. Wallahu alamu!

(Misbahul Munir, Alumni Prodi Ilmu Ekonomi UII, Sekjen Kaukus Aliansi Kebangsaan dan Staf Pengajar di STAI Ash-Shiddiqiyah).

PINTU MASUK TANPA KARANTINA LAGI

Sandiaga Optimis Target Wisman 2022 Tercapai

SEMARANG (KR) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Solahudin Uno mengaku optimis, dengan dibukanya pintu masuk atau border wisatawan mancanegara (wisman) jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia tahun 2022 sekitar 1,8 juta hingga 3,6 juta wisman akan bisa tercapai. Sementara untuk wisatawan nusantara (wisnus) tahun 2022 ini, juga optimis akan mencapai 500 juta kunjungan dengan kontribusi ke negara lewat PDB mencapai 4,3 persen.

"Dengan kondisi covid-19 yang menurun, sehingga pemerintah membuka border wisatawan mancanegara, saya optimis jumlah target wisman ke Indonesia bisa tercapai," kata Sandiaga dalam acara

press Tour Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara virtual di Semarang, Selasa-Kamis (29-31/3).

Sementara itu, Kepala bidang Pemasaran dan Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Tengah Setio Ira-

wan mengatakan, dengan dibukanya border wisatawan mancanegara, akan menjadi angin segar bagi provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan jumlah wisman ke provinsi ini. "Pada tahun 2020 jumlah wisman yang berkunjung ke Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 88 persen. Kemudian pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisman turun lebih tajam lagi hingga 97 persen. Sedangkan yang 3 persen sisanya merupakan kunjungan wisman yang tidak langsung, karena mereka merupakan ekspatriot yang melakukan wisata di Jawa Tengah," jelasnya.

Ditambahkan, dengan dibukanya pintu border bagi wisatawan untuk 42 negara ini tanpa karantina akan menjadi pasar potensial bagi Jawa Tengah, terutama dari Malaysia, Singapura, Cina, India dan Amerika Serikat.

Sementara daerah yang paling sering dikunjungi wisman adalah Borobudur, Prambanan dan berbagai destinasi di Kabupaten Semarang yang mencapai 690 daerah tujuan wisata (DTW).

Sementara untuk wisatawan nusantara (wisnus), pada tahun 2020 mengalami penurunan 60,3 persen, sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan 5,7 persen. (Lmg)

Eni Lestari Bawa Pulang Mobil Undian Tara



KR-Istimewa

Eni Lestari (kanan) menerima hadiah utama dari Siti Handayani.

SLEMAN (KR) - Eni Lestari, warga Salakan 09 Potorono Banguntapan Bantul meraih hadiah utama undian Tabungan Rakyat 'Tara' periode 55, berupa 1 unit mobil Toyota Agya. Penyerahan hadiah dilakukan oleh Direktur Utama BPR Danugung Ramuliti Dra Siti Handayani kepada Eni Lestari di Kantor BPR Danugung Ramuliti, Jalan Solo Km 11, Purwomartani Kalasan Sleman, Selasa (29/3).

Eni yang berprofesi sebagai guru di SMKN 1 Cangkringan ini mengaku tidak memiliki firasat bakal mendapat hadiah utama. Eni telah menjadi nasabah Tabungan Tara sejak 10-an tahun yang lalu. "Gak nyangka dapat hadiah mobil. Mobil ini akan saya pakai sendiri," ujarnya.

Sementara Kasi Dana BPR Danugung Ramuliti, Dian Kusuma menuturkan, undian hadiah menjadi salah satu daya tarik Tabungan Tara. Total hadiah pada undian Tara periode 55 sebesar Rp 231.410.000. Selain hadiah utama 1 unit mobil, disediakan 3 unit motor Honda Beat CBS, 10 unit LED 32 inci Aqua, 5 unit lemari es 1 pintu Aqua dan 10 unit sepeda gunung 1 tahun. Apalagi pengundian hadiah Tabunga Tara digelar dua kali dalam 1 tahun yakni di Bulan Maret dan September.

"Seperti namanya, Tabungan Tara ini sangat merakyat. Adapun perhitungan poin adalah per 10 ribu mendapat 1 poin dan berlaku untuk kelipatannya sesuai dengan saldo yang ada. Semakin banyak saldo, semakin besar peluang memenangkan hadiah," kata Dian. (Dev)

Pembayaran Contactless Makin Populer

JAKARTA (KR) - Pemimpin pembayaran digital, Visa mencatat pembayaran contactless semakin populer di Indonesia, dimana satu dari tiga konsumen menggunakan kartu contactless dan 70 persen telah menggunakannya dengan frekuensi yang lebih sering sejak awal pandemi, berdasarkan studi Consumer Payment Attitudes terbaru dari Visa.

Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman mengatakan, studi tahunan yang menyoroti bertumbuhnya konsumen yang melek digital di Asia Tenggara ini menunjukkan tiga dari empat konsumen Indonesia tertarik melakukan pembayaran menggunakan kartu contactless, didominasi segmen affluent (80 persen) dari Gen Y atau milenial (78 persen). "Alasan utama memilih pembayaran contactless karena bebas repot, mudah digunakan, inovatif, dan higienis, sejalan dengan berkurangnya konsumen membawa uang tunai," ujar Riko Abdurrahman di Jakarta, Selasa (29/3).

Untuk meningkatkan penggunaan pembayaran contactless, Visa kembali melakukan kampanye konsumen selama beberapa bulan ke depan, bekerja sama dengan sejumlah bank dan merchant untuk memberikan penawaran menarik saat berbelanja, serta menggelar permainan 'QR Hunt' berhadiah menarik. (San)



KR-Istimewa

Riko Abdurrahman memperagakan pembayaran dengan kartu Visa contactless.